

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektifitas Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Dalam Pembuatan Kartu Keluarga sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik, mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan sumber data primer dan sekunder dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Dalam pembuatan Kartu Keluarga menunjukkan kesadaran masyarakat yang kurang menjadi masalah utama karena masyarakat tidak begitu sadar akan pentingnya kartu keluarga, mereka akan memperbarui kartu keluarga hanya jika urusan hak waris tetapi dalam akta kematian, surat kepindahan masyarakat hanya akan bersifat pasif. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat malah kurangnya pegawai yang handal dalam setiap bidangnya sehingga menyebabkannya kurang tepat waktu dan efisien sesuai waktu yang dijanjikan. Sedangkan untuk biaya yang dibebankan dalam mengurus dokumen sendiri sudah sesuai kalau tidak ada oknum nakal dari dalam maupun dari luar instansi tersebut.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pelayanan publik, Kartu Keluarga

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effectiveness of public service delivery at the Population and Civil Registration Service of Rembang Regency on Family Card making as the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 concerning Public Service, knowing the obstacles that occur in the implementation of public services and what factors only influencing services at the Population and Civil Registration service of Rembang Regency.

This Study Uses a sociological juridical method that is in dealing with the problems discussed based on applicable regulations and then related to the realities that occur in the community. With primary and secondary data sources and data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews.

The Result of this study indicate that in carrying out public services at the Rembang District Population and Civil Registration Service Towards making Family Cards shows that public awareness is not the main problem because people are not so aware of the importance of family card, they will renew family card only when inheritance rights but in the death certificate, the community transfer letter will only be passive. In this case it also shows that in the implementation of public services carried out by the fields which causes it to be less timely and efficient according to the promised time. Whereas for the costs charged in managing the documents themselves, it is appropriate that there are no bad people from inside or outside the agency.

Keywords: Implementation, Public Services, Family Cards

